

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin. & Asikin, H.Z. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- _____. dkk. (2000). *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung: Sebuah Dokumen Historis*. Jakarta: Sekjen & Kepaniteraan NKRI
- _____. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konpres
- Aries Mujiburohman, Dian. (2017), *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: STPN Press
- Bakar Busroh, Abu. (1985), *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dahlan Thaib. (2015), *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Faiz, PM. (2019), *Amandemen Konstitusi; Komparasi Negara kesatuan dan Negara federal*, Depok: Rajawali Press
- Firman Freaddy Busroh dan Fatria Khairo. 2018. *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Abdul Aziz. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, Jhonny. (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumeduai.
- Kansil, C.S.T. (1984), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Manan, Bagir. (1995), *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISBA

Moh. Mahfud MD. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada.

Palguna, I Dewa Gede. (2013) *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2011), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tutik, Titik Triwulan. (2010), *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta

JURNAL

Creswel, J.W. (1998), *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publication Inc: California

Heru Setiawan. “Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. dalam *Lex Jurnalica* Vol. 14 No. 1. April 2017.

Huda, Miftakhul. (2019), Pengujian UU dan Perubahan Konstitusi: Mengenal Lebih Dekat Gagasan Sri Soemantri, *Jurnal Konstitusi*, VI (4),

Mahfiana, Layyin & Lisma. (2021), Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi. *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 3, No. 1,

Nugroho, Rahmat Muhajir. (2016), Urgensi Pengaturan Perkara *Constitutional Complaint* dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 1

Seno, Yuda Adi. (2012), Kewenangan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak dan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Ilmu Hukum I* (2)

Subiyanto, Achamd Edi. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 5,

Plaituka, Solidaman Bertho. (2016), *Constitutional Complaint* Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia. *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Vol. 23. No.1

Purnamasari, Galuh. (2017), Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi

Perjanjian Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UKSW, Vol 2 No. 2

Zaky, Muhammad. (2016), Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan *Germany Federal Constitutional Court* dan Implementasinya secara global. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 11 No.1

Zoelva, Hamdan. (2012), Constitutionak Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.19.No 1

THESIS

Sagala, Christo Sumurung Tua. “*Konseptualisasi Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga negara Yang Dijamin Oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*”. Thesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Undang-Undang Korea Selatan Konstitusi Republik Korea *The Constitution of the Republic of Korea* 1987;